

PENTINGNYA PENANAMAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI MASYARAKAT PESISIR PULAU TERDEPAN SEBAGAI UPAYA KEIKUTSERTAAN WARGA NEGARA DALAM BELA NEGARA

THE IMPORTANCE OF INVESTMENT OF NATIONAL VALUES FOR FOREIGN COASTAL COMMUNITIES AS AN EFFORT FOR THE PARTICIPATION OF CITIZENS IN STATE DEFENCE

Supriyono¹ Lukman Yudho Prakoso²,

Dohar Sianturi³

Program Studi Strategi Pertahanan Laut, Universitas Pertahanan

(agustinuspriyo527@gmail.com, kamalekumdeplek@gmail.com,

sianturi_dohar@yahoo.co.id)

Abstrak – Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak pulau-pulau terluar yang sangat rentan untuk menjadi target oleh negara asing. Posisi pulau-pulau terdepan di wilayah perairan Indonesia memiliki dampak penting dalam aspek pertahanan. Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun pulau-pulau terluar yaitu di antaranya melakukan upaya-upaya pembangunan infrastruktur guna mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pulau terluar Indonesia. Namun sebenarnya ada satu hal yang lebih penting, yaitu membangun kesadaran berbangsa bagi masyarakat pesisir di pulau terluar. Penanaman nilai-nilai kebangsaan perlu dilakukan, yaitu sebagai upaya dalam Bela Negara yang merupakan bagian tujuan dari kementerian pertahanan yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di kawasan pulau terluar. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya penanaman nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat pesisir pulau terluar sebagai upaya keikutsertaan warga negara dalam bela negara dan apa pengaruhnya bagi masyarakat pesisir pulau terluar. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka. Hasil studi ini menunjukkan menunjukkan bahwa pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat perlu diutamakan sebelum menanamkan nilai-nilai kebangsaan, dan penanaman nilai-nilai kebangsaan akan memberikan *sense of defense* dan *deterrent effect* bagi siapapun yang akan mengusik kedaulatan Indonesia.

Kata Kunci : Nilai kebangsaan, Bela Negara, Pulau Terluar, Masyarakat Pesisir, Pertahanan Semesta.

Abstract- Indonesia as an archipelago has many outer islands which are very vulnerable to be targeted by foreign countries. The position of the frontier islands in Indonesian territorial waters has an important impact in the aspect of defense. Some of the steps taken by the government in building the outer islands include making efforts to develop infrastructure to boost the economy and welfare of the people in the outer islands of Indonesia. But actually there is one thing that is more important, namely building national awareness for coastal communities in the outer islands. The inculcation of

¹Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

²Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

³Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

national values needs to be carried out, namely as an effort in State Defense which is part of the objectives of the Ministry of Defense which is carried out throughout Indonesia, including in the outer islands. This article aims to analyze the importance of cultivating national values for the outermost coastal communities as an effort to involve citizens in defending the state and what is the impact on the outermost coastal communities. This study uses a qualitative method through literature study. The results of this study indicate that the welfare approach for the community needs to be prioritized before instilling national values, and the cultivation of national values will provide a sense of defense and a deterrent effect for anyone who will disturb Indonesian sovereignty.

Keywords: National values, State Defense, Outer Islands, Coastal, Defense of the Universe

Pendahuluan

Pertahanan merupakan istilah yang kerap kali diartikan sebagai tugas militer. Pada dasarnya, militer merupakan istilah yang digunakan untuk mengindikasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh personel berseragam yang disebut tentara. Sementara itu, pertahanan dapat didefinisikan sebagai kegiatan mempertahankan negara yang tidak hanya melibatkan tentara, tetapi juga masyarakat sipil. Hal ini pula yang tergambar dalam istilah bela negara.⁴

Upaya bela negara tidak hanya menjadi tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Kewajiban bela negara diemban oleh seluruh masyarakat Indonesia berlandaskan pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

Keempat hal ini merupakan paradigma nasional yang menjadi kerangka berpikir masyarakat Indonesia terkait pelbagai permasalahan nasional.

Hal ini pula yang mendasari pelaksanaan pendidikan bela negara oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pendidikan ini dilaksanakan melalui empat poin pembelajaran, yaitu pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer wajib, pelatihan ala TNI, dan pelatihan sesuai profesi masing-masing. Keempat poin ini bersesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem pertahanan semesta. Apalagi ada lima nilai dasar yang menjadi inti kurikulum pendidikan bela negara, yaitu cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi negara, dan kemampuan bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik.⁵

⁴Jerry Indrawan & Efriza, "Membangun Komponen Cadangan Berbasis Kemampuan Bela Negara Sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Nir-Militer", *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 8, No. 2, 2018, hlm. 108.

⁵*Ibid*, hlm 111

Jika meninjau pada nilai yang menjadi inti pada pendidikan bela negara, semuanya sudah disampaikan dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga SMA atau sederajat. Di beberapa universitas juga sudah menetapkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Namun, dalam kurikulumnya tidak ada wajib militer dan pelatihan ala TNI, sehingga pemahaman militer menjadi sangat minim.⁶

Salah satu alternatif dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menumbuhkan kesadaran semangat bela negara kepada segenap anggota masyarakat. Kesadaran berbangsa dan bernegara berarti sikap dan tingkah laku harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia (sesuai amanah yang ada dalam Pembukaan UUD 1945) melalui:

1. Menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang mendiami banyak

pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam bahasa dan adat istiadat kebudayaan yang berbeda-beda. Kemajemukan itu diikat dalam konsep wawasan nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sikap dan perilaku yang patriotik dimulai dari hal-hal yang sederhana yaitu dengan saling tolong menolong menciptakan kerukunan beragama dan toleransi dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, saling menghormati dengan sesama dan menjaga keamanan lingkungan.
3. Memiliki kesadaran atas tanggungjawab sebagai warga negara Indonesia yang menghormati lambang-lambang negara dan mentaati peraturan perundangundangan.

⁶Erlinda Matonandang, "Kurikulum Bela Negara Di Tingkat Pendidikan Tinggi: Prospektif Ketimpangan Dalam Sistem Pertahanan

Indonesia", *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 5, No. 3, 2015, hlm 34.

Perlunya penanaman kesadaran bela negara bagi setiap unsur bangsa sangat penting dilakukan karena kesadaran bela negara adalah dimana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain:

1. Cinta Tanah Air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Warga negara dapat mewujudkan itu semua dengan cara setiap warga

mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan dan pastinya menjaga nama baik negara.

2. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap setiap warga negara yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya.

3. Pancasila, merupakan ideology warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa, pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan.

4. Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara. Dalam wujud bela negara tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sebagai contoh adalah dengan melakukan bela negara di tiap tiap profesi yang kita jalani.

5. Memiliki Kemampuan Bela Negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing.

Hubungan/keterkaitan antara pembelaan negara atau bela negara dengan ketahanan nasional meliputi:

1. Pembelaan Negara sebagai suatu sistem lebih menekankan pada komponen kekuatan, strategi dan sosialisasi. Sedang Ketahanan Nasional itu merupakan sasaran dan tujuan dari upaya-upaya pembelaan negara. Tujuan Ketahanan Nasional akan diukur melalui seberapa jauh “keuletan” warga negara dalam partisipasi dan implementasinya dalam Ketahanan Nasional dan seberapa besar kekuatan “ketanggahan” warga negara dalam Ketahanan Nasional.
2. Pembelaan Negara sebagai wujud partisipasi warga negara yang dilakukan secara semesta dalam arti bahwa seluruh daya bangsa dan negara mampu memobilisasi diri guna menanggulangi setiap bentuk

ancaman baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri adalah dalam rangka memelihara dan meningkatkan Ketahanan Nasional.

3. Perihal usaha atau upaya bela negara itu bagi warga negara bukan suatu kesadaran, fakultatif, tetapi harus diterima sebagai suatu panggilan tugas dan kewajiban, karena ancaman yang datang baik yang langsung maupun tidak langsung dapat timbul sewaktu-waktu, dan pengingkaran terhadap kewajiban bela negara merupakan karapuhan Ketahanan Nasional, yang pada gilirannya akan membahayakan identitas, keutuhan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasionalnya.⁷

Pembinaan kesadaran bela negara perlu dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia, baik dipedesaan, perkotaan, dan diwilayah perbatasan. Hingga wilayah pesisir. Fungsinya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa sesuai dengan profesi yang dimiliki.

Sehingga bagaimana penanaman nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat

⁷Sutarman “Persepsi dan Pengertian Pembelaan Negara Berdasarkan UUD 1945

(Amandemen)”, *Jurnal Magistra*, No. 75, 2011, hlm 53

pesisir pulau terluar sebagai upaya keikutsertaan warga negara dalam bela negara dan apa pengaruh penanaman nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat pesisir pulau terluar sebagai upaya keikutsertaan warga negara dalam bela negara sebagai wujud pertahanan rakyat semesta.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi kepustakaan adalah melakukan pendalaman data-data berdasarkan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti⁸.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya, yaitu memberikan

gambaran melalui data dan fakta-fakta yang ada tentang ancaman maritim yang ada di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan diperoleh dari hasil telaah pustaka dan interpretasi dari bahan yang terdapat dalam buku-buku, dokumen, akses situs serta artikel-artikel lepas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data-data tersebut berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Pembahasan

Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ciri khas atas keanekaragaman suku, bahasa, dan budayanya. Secara fisik antar satu budaya dan budaya lain dipisahkan oleh laut. Akan tetapi, pemisahan itu tidak bisa dilihat dari segi kemaritiman karena seluruh perairan yang ada di Nusantara adalah pemersatu yang mengintegrasikan ribuan pulau yang terpisah-pisah tersebut.

Di negara Indonesia berdiam sebuah bangsa besar yang mendiami wilayah dan negara kepulauan, bangsa yang multikultur. yang di dalamnya ada

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, Cet. 19 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 291.

dua kelompok kehidupan, yaitu kelompok masyarakat yang mendiami wilayah pesisir dan kelompok masyarakat yang mendiami wilayah pedalaman. Secara sadar atau tidak, kedua kelompok masyarakat ini hidup dalam sebuah ketergantungan akan laut. Semuanya itu kembali pada konsep hidup dan kesadaran ruang hidup yang berasal dari heterogenitas tadi. Kemudian dalam sejarahnya, juga tercatat antagonis hasrat untuk saling mengendalikan dari kedua kelompok besar itu sendiri. Kelompok yang tinggal di darat berusaha untuk mengendalikan pesisir dengan segala upaya untuk mendapatkan hasil dari laut, dan juga sebaliknya.⁹

Masyarakat maritim pada umumnya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan (*marine resource based*), seperti nelayan, pembudidayaan ikan, penambangan pasir dan transportasi laut. Tingkat pendidikan penduduk wilayah pesisir juga tergolong rendah. Kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan

terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relative berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumberdaya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.¹⁰

Dalam Buku Putih Pertahanan Negara disebutkan bahwa pertahanan negara Indonesia disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta guna mencapai tujuan nasional. Pertahanan negara yang bersifat semesta ini pada hakikatnya adalah suatu bentuk pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Sistem pertahanan semesta itu sendiri mengombinasikan pertahanan militer serta pertahanan nirmiliter melalui usaha membangun kekuatan pertahanan negara yang kuat dan disegani. Hal tersebut dipersiapkan secara dini dengan harapan dapat bekerja secara berkelanjutan dalam menghadapi berbagai jenis ancaman. Oleh karena itu, masyarakat maritime tentunya memiliki peran dalam upaya pertahanan negara.¹¹

⁹Adnan Madjid, "Membangun Kesadaran Masyarakat Maritim Dalam Perspektif Bela Negara", *Majalah Wira*, Vol. 74, No. 58, September 2018, hlm. 7-8.

¹⁰*Ibid*, hlm. 8

¹¹Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*, (Jakarta:

Untuk itu konsep pengembangan kawasan pulau terdepan sangat terbantu oleh sikap masyarakat maritim yang hidup di wilayah perbatasan dengan negara lain guna menjaga kutuhan wilayah NKRI. Dengan adanya optimalisasi dan pemberdayaan masyarakat maritim, maka dukungan pertahanan dan keamanan negara dapat terjamin yang ditandai dengan aktivitas oleh masyarakat maritim Indonesia sebagai wujud dari pertahanan semesta. Karenanya penanaman nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat daerah pesisir di pulau terdepan menjadi sebuah keharusan sebagai wujud bela negara setiap unsur bangsa.

Luasnya spektrum bela negara yang dimulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan Negara. Di Indonesia, proses pembelaan negara sudah diatur secara formal ke dalam Undang-undang. Diantaranya sudah disebutkan ke dalam Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945, khususnya pasal 30.¹²

Didalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan melaksanakan kewajiban bela bangsa tersebut, hal ini menjadi bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa, termasuk didalamnya unsur penting bela negara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara.¹³

Laut sendiri merupakan ajang dalam pencarian kehidupan bagi masyarakat maritim. Pada mulanya masyarakat bertujuan mencari hidup dan mempertahankan hidup, namun pada akhirnya mereka juga bertujuan mengembangkan kesejahteraan, atau dengan kata lain membangun kejayaan dan kekayaan dari kegiatan kemaritiman dalam rangka mencapai tujuan nasional. Laut menjadi media pemersatu bangsa karena melalui laut banyak orang dari berbagai bangsa melakukan interaksi dengan bermacam-macam aktivitas.

Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2015), hlm. 32.

¹²UUD 1945 Pasal 30.

Melalui laut orang dari berbagai bangsa menjalankan aktivitas perekonomian melalui “jasa” pelayaran antar benua atau antar pulau. Tentunya, hal-hal yang terkait dengan kemajuan dunia maritime tersebut patut untuk diberdayakan.

Dalam masyarakat maritim, termasuk di Indonesia, telah tumbuh berbagai sektor dan subsektor ekonomi kemaritiman baru yang memunculkan segmen-segmen atau kategori-kategori sosial seperti petambang, pekerja industri, pengelola dan karyawan wisata, marinir, akademisi/peneliti, birokrat, dan lain-lain. Tumbuh kembangnya sektor-sektor ekonomi dan jasa dengan segmen-segmen masyarakat maritim tersebut memerlukan dan diikuti dengan perkembangan dan perubahan-perubahan kelembagaannya menjadi wadah dan regulasinya¹⁴. Bentuk nyata pemberdayaan lainnya adalah dengan memotorisasi perahu nelayan dalam rangka pengembangan usaha yang didukung dengan teknologi perikanan laut yang mumpuni diiringi dengan membangun SDM masyarakat maritim itu sendiri.

Dukungan konsep bela negara dapat diartikan secara non fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara khususnya dalam mewujudkan “Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”. Guna terwujudnya pertahanan semesta, maka sumber daya manusia menjadi titik sentral yang perlu dibina dan dikembangkan sebagai potensi bangsa yang mampu melaksanakan pembangunan maupun mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, layaknya pertahanan semesta, masyarakat maritim juga harus direalisasikan pada diri seluruh masyarakat Indonesia karena bangsa Indonesia merupakan bangsa maritim yang mendunia.

Wilayah pulau terdepan sebagai konsep halaman depan Indonesia memiliki arti penting dalam aspek

¹⁴Lembaga Administrasi Negara, *Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2015).

pertahanan. Dari perspektif Pertahanan merupakan wilayah yang harus dijaga kedaulatannya baik dari gangguan internal maupun secara eksternal, karena ancaman bagi kedaulatan negara khususnya di perbatasan dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.¹⁵ Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dijelaskan bahwa kawasan perbatasan darat dan laut Indonesia dinyatakan memiliki arti penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar.¹⁶

Yang dimaksud dengan pengaruh penanaman nilai-nilai kebangsaan untuk mengembangkan sikap Bela Negara di lingkungan masyarakat pesisir adalah bagaimana masyarakat daerah pesisir pulau terdepan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagaimana kondisi kesadaran Bela Negara masyarakat dan apa saja yang melatarbelakangi atau penyebab terjadinya kondisi Bela Negara masyarakat tersebut, ditinjau dari faktor kondisi masyarakat sendiri maupun ditinjau dari kondisi lingkungannya. Kondisi masyarakat yang dimaksud antara lain pendidikan, ekonomi dan kultur yaitu budaya, watak dan kebiasaan dari kebanyakan masyarakat, sedangkan kondisi lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang mempunyai kontribusi terhadap Pemahaman dan Implementasi Bela Negara masyarakat, yang didapat dari bangku sekolah, satgas perbatasan, pemerintah Kabupaten/Kota yang menaungi pulau terdepan di Indonesia, serta Kementerian/Lembaga terkait.¹⁷

Salah satu aspek nasionalisme adalah kebanggaan akan jati diri bangsa. Bagian ini akan menguraikan sejauh mana masyarakat yang hidup di Pulau terdepan memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang dipahami dalam terminologi para ahli sebagai “komunitas politik yang dibayangkan”. Kebanggaan

¹⁵Kementerian Pertahanan RI, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*, (Jakarta: Kemhan RI, 2008).

¹⁶*Ibid*, hlm. 27.

¹⁷Muhammad Suhari, “Pemahaman Dan Implementasi Bela Negara Masyarakat Pesisir Sekitar Obyek Vital Nasional Bandara Juanda”, *Jurnal Prodi Strategii Perang Semesta*, Vol. 3, No. 2, April 2017.

nasional warga di daerah perbatasan muncul sebagai konsekuensi logis dalam keberhasilan negara menyelenggarakan pembangunan nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama transportasi dan komunikasi. Kurangnya pemenuhan kesejahteraan dapat berimplikasi pada menurunnya kebanggaan nasional dan memberikan kemungkinan yang lebih besar terhadap menurunnya ketahanan dalam menjaga keberlangsungan negara bangsa.¹⁸

Rasa kebangsaan bukanlah sesuatu yang bersifat *taken for granted* atau terjadi dengan sendirinya, tetapi sesuatu yang secara sosial dan politik dikonstruksi oleh institusi-institusi negara melalui proses sosial, yakni upaya-upaya pemeliharaan nasionalisme. Nasionalisme ditanamkan oleh aparat-aparat ideologi negara terhadap masyarakat dengan menggunakan ritual-ritual nasionalisme. Ritus-ritus dalam masyarakat tradisional, menurut Durkheim¹⁹, bertujuan meningkatkan solidaritas dan integrasi sosial yang dilakukan

melalui penciptaan simbol-simbol tertentu. Sebagaimana sebuah ritus dalam masyarakat tradisional, upaya pemeliharaan nasionalisme dilakukan secara berulang-ulang dan di institusionalisasikan.²⁰

Lembaga-lembaga negara telah melakukan upaya yang sistematis dan terencana untuk mengajarkan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Institusi pendidikan dari SD sampai SMA, yaitu merupakan salah satu instrumen negara untuk menanamkan ideologinya terhadap masyarakat sipil²¹. Praktik-praktik tersebut secara sosiologis dapat dilihat sebagai ritus-ritus nasionalisme, yang didefinisikan secara teoretis sebagai upacara-upacara menggunakan simbol-simbol untuk menggalang solidaritas suatu kelompok dan sekaligus menjaga integrasi sosial. Implikasi ritus-ritus nasionalisme seperti ini adalah penanaman pengetahuan masyarakat tentang Indonesia yang dipahami dalam

¹⁸P.P Nainggolan, *Batas wilayah dan situasi perbatasan Indonesia: ancaman terhadap integritas teritorial*. (Jakarta: Tiga Putra Utama, 2004), hlm. 13.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Emilie Durkheim, *The elementary of the religious life*. (New York: Free Press, 1993), hlm. 118.

²¹Jerry Indrawan, "Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan", *Jurnal Pertahanan*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2015.

konsepsi politik, yaitu NKRI dan simbol-simbolnya.²²

Selain pemenuhan kesejahteraan masyarakat daerah pesisir pulau terluar, Pemantapan iklim kondusif bagi terpeliharanya stabilitas sosial politik perlu segera dilakukan. Keberhasilan dari proses ini ditandai dengan menurunnya konflik sosial politik. Pemantapan ini diupayakan melalui penerapan strategi nasional pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai – nilai nasionalisme bangsa mengandung kaidah atau norma yang harus tertanam dan terpatri dalam jiwa seluruh anak bangsa ini. Hal ini menunjukkan semua ucapan, tingkah laku dan tindakan manusia haruslah dijiwai dengan semangat ataupun pancaran akan nasionalisme yang menyimbolkan rasa senasib sepenanggungan, solidaritas, berwawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan.

Penanaman nilai-nilai kebangsaan untuk memupuk kesadaran Bela Negara ini dimaksudkan untuk membangun rasa cinta tanah air dan Bela Negara yang

merupakan salah satu upaya revolusi mental melalui pembangunan karakter bangsa sebagaimana menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang tertuang dalam nawacita diantaranya melalui penanaman nilai-nilai Patriotisme, Cinta Tanah Air dan Bela Negara. Penanaman nilai-nilai Bela Negara serta cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, yakin akan kebenaran ideologi pancasila dan memiliki kemampuan awal Bela Negara kepada setiap warga negara ini sangat penting sebagai upaya membangun *sense of defence* bangsa Indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman. Pentingnya penanaman nilai-nilai tersebut oleh karena adanya perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh pada perubahan paradigma ancaman yang sudah bersifat multi dimensi dalam bentuk dan sifatnya. Kesadaran Bela Negara menjadi modal sosial bagi bangsa Indonesia sekaligus menjadi *deterrence effect* bagi bangsa lain yang ingin mengganggu, mengancam bahkan menghancurkan bangsa Indonesia dari

²²Cahyo Pamungkas, “Nasionalisme Masyarakat Di Perbatasan Laut: Studi Kasus Masyarakat

Melayu Karimun”, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 41, No. 2, Desember 2015.

berbagai sisi. Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga menjadi tuntutan pada era globalisasi ini, akan tetapi jiwa nasionalisme dan patriotisme dengan dilandasi nilai-nilai Bela Negara seperti cinta tanah air dan kesadaran Bela Negara juga harus dimiliki oleh setiap warga negara. Sumber Daya Manusia yang hanya menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi saja tanpa memiliki jiwa nasionalisme, cinta tanah air dan kesadaran Bela Negara justru akan membahayakan kelangsungan hidup bangsa.²³

Dalam perspektif Pertahanan, kualitas sebagaimana tersebut di atas merupakan Sumber Daya Manusia Potensi Pertahanan Negara. Dengan kualitas itulah, setiap warga negara sudah pasti memiliki kesiapsiagaan dini baik secara psikis maupun fisik, dalam menghadapi berbagai bentuk dan sifat ancaman yang datang, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Essensi kesadaran Bela Negara dalam Pertahanan Negara merupakan landasan bagi terbangunnya Sistem

Pertahanan Semesta, baik dalam menghadapi ancaman militer maupun ancaman non militer. Program pembinaan Kader Bela Negara merupakan bagian dari suatu proses pembinaan Sumber Daya Manusia yang tidak akan pernah berhenti, senantiasa berlanjut dan berkesinambungan serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara guna mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki jiwa nasionalisme, cinta tanah air dan kesadaran bela negara, dalam 5 tahun ke depan, Kementerian Pertahanan akan membentuk kader Bela Negara melalui institusi Kabupaten/Kota di pulau terdepan Indonesia yang dilaksanakan secara sinergitas, sehingga diharapkan dapat menghasilkan kader Bela Negara yang memiliki jiwa nasionalisme dan cinta tanah air, sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam upaya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas guna turut menjamin kelangsungan hidup bangsa

²³Kementerian Pertahanan, "Pembentukan Kader Bela Negara Bagi Masyarakat Perbatasan di Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018". Dalam <https://www.kemhan.go.id/poathan/2018/0>

[/22/pembentukan-kader-bela-negara-bagi-masyarakat-perbatasan-di-kecamatan-tasifeto-barat-kabupaten-belu-provinsi-nusa-tenggara-timur-ta-2018.html](https://www.kemhan.go.id/poathan/2018/0/22/pembentukan-kader-bela-negara-bagi-masyarakat-perbatasan-di-kecamatan-tasifeto-barat-kabupaten-belu-provinsi-nusa-tenggara-timur-ta-2018.html), 22 Januari 2018, diakses pada 24 Desember 2020.

dan negara di tengah derasnya arus globalisasi saat ini

Kesimpulan

Pentingnya penanaman nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat pesisir pulau terluar Indonesia dalam meningkatkan rasa bela negara di kawasan perbatasan perlu menjadi perhatian di tengah globalisasi yang dapat berubah menjadi ancaman transnasional. Yang perlu diperhatikan sebelum menanamkan nilai-nilai kebangsaan bagi komunitas masyarakat di daerah pesisir, pemerintah perlu meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan fasilitas infrastruktur di wilayah pulau terluar. Hal tersebut merupakan faktor eksternal untuk memperkuat rasa nasionalisme masyarakat pesisir pulau terluar.

Pembinaan kesadaran Bela Negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional, sehingga pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan semata, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama melalui Kementerian/Lembaga serta segenap Komponen Bangsa. Upaya Bela Negara sebagai kewajiban warga negara, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan

penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Penanaman kesadaran bela negara di kawasan pesisir dapat memberikan dampak efektif dari aspek pertahanan.

Penanaman nilai-nilai kebangsaan penting sebagai upaya membangun *sense of defence* bangsa Indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman sekaligus menjadi *deterrence effect* bagi bangsa lain yang ingin mengganggu, mengancam bahkan menghancurkan bangsa Indonesia dari berbagai sisi.

Maka pembinaan kesadaran berbangsa bagi masyarakat daerah pesisir merupakan tanggung jawab bersama semua pemangku kepentingan baik di daerah maupun di pusat untuk bersama membangun kepentingan yang lebih besar yaitu menjaga keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Durkheim, Emilie. 1993. *The elementary of the religious life*. New York: Free Press.

Kementerian Pertahanan RI, Buku Putih Pertahanan RI tahun 2008, Jakarta: Kementerian Pertahanan.

Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia. Departemen Pertahanan RI.

Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Nainggolan, P. P. 2004. *Batas wilayah dan situasi perbatasan Indonesia: ancaman terhadap integritas teritorial*. Jakarta: Tiga Putra Utama.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, Cet.19. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Jurnal

Indrawan, Jerry & Efriza. 2018. "Membangun Komponen Cadangan Berbasis Kemampuan Bela Negara Sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Nir-Militer". *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. Vol. 8. No. 2..

Indrawan, Jerry. 2015. *Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan*. *Jurnal Pertahanan*: Agustus 2015, Vol.5 No. 2.

Madjid, Adnan. 2018. "Membangun Kesadaran Masyarakat Maritim Dalam Perspektif Bela Negara". *Majalah Wira*. Vol. 74. No. 58. September.

Matonandang, Erlinda. 2015. "Kurikulum Bela Negara Di Tingkat Pendidikan Tinggi: Prospektif Ketimpangan Dalam Sistem Pertahanan

Indonesia". *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. Vol.5. No. 3.

Pamungkas, Cahyo. 2015. "Nasionalisme Masyarakat Di Perbatasan Laut: Studi Kasus Masyarakat Melayu Karimun". *Jurnal Sosiologi*. Vol. 41 No. 2. Desember.

Suhari, Muhammad. 2017. "Pemahaman Dan Implementasi Bela Negara Masyarakat Pesisir Sekitar Obyek Vital Nasional Bandar". *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta*. Vol.2. No2. Jakarta: Universitas Pertahanan.

Sutarman. 2011. "Persepsi dan Pengertian Pembelaan Negara Berdasarkan UUD 1945 (Amandemen)". *Jurnal Magistra*. No. 75.

Artikel Online

Kementerian Pertahanan, *Pembentukan Kader Bela Negara Bagi Masyarakat Perbatasan di Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018*. Dalam <https://www.kemhan.go.id/poehan/2018/03/22/pembentukan-kader-bela-negara-bagi-masyarakat-perbatasan-di-kecamatan-tasifeto-barat-kabupaten-belu-provinsi-nusa-tenggara-timur-ta-2018.html>

